

**PENGAWASAN DAN TINDAKAN KANTOR IMIGRASI KELAS I MALANG
TERHADAP PELANGGARAN IZIN TINGGAL TERBATAS (KITAS) YANG
DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING**

(Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Malang)

Shagita Christmarrathus, Dr. Istislam, S.H.,M.Hum, Herlin Wijayati, S.H.,M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

shagita36@yahoo.com

Abstrak

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas Pengawasan Dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas Yang Dilakukan Warga Negara Asing. Yang melatarbelakangi penulisan ini bahwa Pelanggaran Kartu izin Tinggal masih ada di wilayah Imigrasi Malang dan harus ada tindakan tegas atas permasalahan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan Kantor Imigrasi Klas I Malang telah melakukan deportasi terhadap 32 warga negara asing.

Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah: Bagaimana pengawasan dan tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang terhadap Pelanggaran Ijin Tinggal Terbatas serta apa saja kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Menindak Pelanggaran Ijin Tinggal Terbatas, yang dilakukan warga negara asing di wilayah keimigrasian Malang dan upaya apa saja untuk mengatasi kendala tersebut.

Penulis menggunakan metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian empiris ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu bahwa pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Malang terhadap pelanggaran ITAS yang dilakukan warga negara asing dilakukan dengan pengawasan terbuka dan tertutup. Tindakan keimigrasian dapat dilakukan melalui dua cara yaitu Tindakan Administrasi Keimigrasian

dan Tindakan Pro Yustisia. Kendalanya pada faktor internal, unit di kantor imigrasi Malang untuk menangani ITAS terdapat 4 personel saja. Pada faktor eksternal, yakni ada dua, pertama orangnya sulit untuk dilacak keberadaan dan instansinya yang mempersulit untuk diawasi. Upaya yang ditempuh adalah dengan sosialisasi di perusahaan asing.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan, bahwa masih ada kendala dalam pengawasan dan menindak pelanggaran Izin Tinggal Terbatas yang dilakukan warga negara asing.

Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka Kantor Imigrasi Kelas I Malang, harus terus melakukan sosialisasi, mempertegas peraturan, meningkatkan keamanan dan prosedur pengurusan Izin Tinggal Terbatas.

Kata Kunci: Pengawasan, Tindakan, Kantor Imigrasi, Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas, Warga Negara Asing

Abstract

In writing this paper the author discusses Oversight and Actions Malang Immigration Office Class I Violations Against Limited Stay Permit To Do foreign citizens. The background of this paper that permits Card Abuse Staying still in the region of Malang Immigration and decisive action must be taken on the issue. This is evidenced by the Immigration Office Class I Malang has done the deportation of 32 foreign nationals.

The problem studied in this thesis is: How supervision and Immigration Office Class I action towards Malang Limited Stay Permit Violations and what are the constraints faced Malang Immigration Office Class I Following Abuse In Limited Stay Permit, which made immigration of foreign citizens in the region and efforts Malang anything to overcome these obstacles.

The author uses the method of approach used in this empirical study is socio-juridical approach.

Based on the results of the study, the authors obtained answers to existing problems, namely that supervision Malang Immigration Office Class I against violations committed Itas foreign nationals carried out by monitoring the open and closed. Immigration measures can be done

in two ways: Immigration Administration Measures and Actions Pro Yustisia. Barriers to internal factors, the unit at the immigration office to handle itas Malang there are 4 personnel only. On external factors, ie, there are two, the first person is difficult to track the existence and the institution that make it difficult to monitor. Efforts need to focus on socialization in foreign companies.

From the above discussion it can be concluded, that there are still obstacles in the supervision and crack down on violations committed limited residence permits foreign nationals.

Responding to the things mentioned above, then Malang Immigration Office Class I, must continue to socialize, reinforce the rules, safety and maintenance procedures Limited Stay Permit.

Keywords: Monitoring, Action, Immigration Office, Violations of limited residence permits, Foreign Nationals

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Imigrasi adalah lembaga Negara yang vital bagi lalu lintas perpindahan penduduk antar Negara. Fungsi keimigrasian menurut Bagir Manan¹ merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi Negara. Di dalam fungsi administrasi dari keimigrasian adalah berkenaan dengan tindakan keimigrasian.

Tindakan keimigrasian biasanya dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh warga Negara asing yang tinggal di wilayah Republik Indonesia.

Negara Indonesia memiliki sejuta pesona yang menyebabkan orang asing berkeinginan mengunjungi dan tinggal di Indonesia. Apalagi di era perdagangan bebas ini, banyak orang asing yang ingin mengembangkan bisnis di Indonesia, mereka menganggap Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya, dan menurut mereka masih banyak peluang untuk mengeksplorasi kekayaan Indonesia menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan

¹ Bagir Manan, "Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional", *disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian*, Jakarta, 14 Januari 2000, hlm. 7.

bagi mereka. Sumber daya alam yang melimpah mempunyai nilai ekonomi serta keindahan panoramanya menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap orang, tidak mengherankan apabila Indonesia merupakan salah satu titik sentral perhatian negara-negara lain baik bidang politik maupun bidang lain seperti sosial, ekonomi dan keamanan. Hal inilah yang kemudian membuat warga negara asing ingin tinggal di Indonesia.²

Untuk dapat tinggal di Indonesia tentu saja seorang Warga Negara Asing harus memiliki Izin Tinggal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kantor Imigrasi. Izin tinggal ada dua, yakni Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal tetap.

Dalam penelitian peneliti, fokus pada Izin Tinggal Terbatas (ITAS). Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan pada orang asing pemegang Izin Tinggal Sementara. Menurut pasal 31 PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian ("PP No. 32/1994"), Izin Tinggal Terbatas sendiri adalah salah satu jenis izin keimigrasian yang diberikan pada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas. Orang asing yang boleh mendapatkan izin tinggal terbatas adalah:

1. Orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas
2. Orang asing pemegang Visa Terbatas
3. Orang asing yang bekerja sebagai nakhoda, anak buah kapal di kapal atau alat apung atau sebagai tenaga ahli pada kapal atau alat apung yang langsung bekerja di perairan nusantara, laut teritorial atau pada instalasi landas kontinen atau pada zone ekonomi eksklusif.

Jadi, sebelumnya harus mengurus visa untuk orang asing tersebut. Visa Tinggal Terbatas diberikan bagi orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Masuk di wilayah Negara Republik Indonesia (lihat pasal 13 PP No. 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP No. 32/1994).

Sesungguhnya pengurusan kITAS tidaklah susah, Izin Tinggal Terbatas dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuknya (lihat pasal 52 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian). Permohonan mendapatkan Izin Tinggal Terbatas tersebut diajukan melalui Kepala Kantor Imigrasi dengan

² Dwidjowijoto, R. N. "*Analisis Kebijakan*". (Jakarta: Elek Media komputindo, 2007), hal. 24

cara mengisi daftar isian yang telah ditentukan dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut:

1. Surat Sponsor dan jaminan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi formulir yang telah ditentukan;
2. Surat keterangan jaminan dan identitas sponsor;
3. Foto copy dan asli paspor atau dokumen perjalanan, Buku Pendaftaran Orang Asing dan Kartu Izin Tinggal Terbatas orang asing yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku;
4. Melampirkan Telex Visa;
5. Bagi isteri dan atau anak yang belum dewasa dan belum kawin, melampirkan akte perkawinan dan akte kelahiran serta surat identitas suami atau orang tua;
6. Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pendaftaran Wajib Pajak (NPWP), RPTKA - TA. 01/TA.02/IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing);
7. Tidak termasuk dalam daftar Cegah – Tangkal;
8. Pas foto berwarna terbaru ukuran 2 x 3, 4 lembar;
9. Membayar biaya Imigrasi sesuai peraturan;

Berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Izin tinggal terbatas itu sendiri diberikan oleh Imigrasi kepada:

- a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas atau Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan, yang meliputi :
 1. Orang Asing dalam rangka penanaman modal;
 2. Bekerja sebagai tenaga ahli;
 3. Melakukan tugas sebagai rohaniawan;
 4. Mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 5. Mengadakan penelitian ilmiah;
 6. Menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal terbatas;
 7. Menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia;

8. Menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin;
 9. Orang Asing eks warga negara Indonesia; dan
 10. Wisatawan lanjut usia mancanegara.
- b. Anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
 - c. Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
 - e. Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
 - f. Orang Asing untuk melakukan pekerjaan singkat.³

Berakhirnya izin tinggal terbatas berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
- b. kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya;
- c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. izinnya telah habis masa berlaku;
- e. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap;
- f. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- g. dikenai Deportasi; atau
- h. meninggal dunia.

Pesebaran Warga Negara Asing tidak hanya berada di kota-kota besar melainkan ada di seluruh wilayah Indonesia termasuk juga di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang, sehingga tentu saja kewenangan untuk melakukan tindakan keimigrasian terhadap penyalahgunaan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di wilayah keimigrasian Malang menjadi tanggung jawab dari Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Wilayah Keimigrasian Malang meliputi Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu), Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dan Kota Lumajang.

³ <http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/izin-tinggal-terbatas-itas>, diakses tanggal 28 Januari 2014

Sampai bulan Oktober 2013 dari sekitar 4000 warga negara asing (WNA) yang berdomisili di Kota Malang, Jawa Timur, hanya sekitar 800 orang yang memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Sedangkan yang lainnya bahkan tidak pernah melaporkan keberadaannya di kantor imigrasi setempat Selama sembilan bulan terakhir di tahun 2013, sebanyak 24 WNA dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang karena tidak mengantongi KITAS. Mereka, yang kebanyakan berasal dari China dan Taiwan, hanya memiliki visa kunjungan. Namun, mereka bekerja di sejumlah perusahaan di Lumajang, Malang dan Pasuruan.⁴

Pelanggaran Kartu izin Tinggal seperti yang dipaparkan dalam paragraf diatas itulah menimbulkan pertanyaan mengapa hanya ada 800 orang WNA yang memiliki Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), sementara yang lainnya tidak memiliki Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) tersebut, apakah ada kendala-kendala yang dialami oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam melakukan pengawasan dan penindakan terkait Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS).

Terdapat permasalahan menarik, terkait yang dilansir detik news.com. MALANG - Dua warga negara Tiongkok, Zhangping Liu dan Chishheng Zhang ditangkap petugas Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Penangkapan itu dilakukan lantaran keduanya tidak memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan dan Penindakan Imigrasi (Wasdakim) Kantor Imigrasi Kelas I Malang, Romi Yudianto menjelaskan bahwa mereka berdua ditangkap di Prigen, Pasuruan ketika melakukan survei kayu Sonokeling di beberapa tempat usaha di daerah tersebut.

"Mereka melakukan kegiatan penjualan kayu, sedangkan visa yang digunakan yaitu visa wisata. Seharusnya mereka punya KITAS untuk izin tinggal sementara," kata Romi kepada Malang Post.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kedua orang ini melanggar UU No. 6 tahun 2011 pasal 122 tentang penyalahgunaan izin tinggal. Ke depan, pihak Kantor Imigrasi Kelas I Malang akan segera melakukan deportasi ke negara asal mereka. Untuk waktunya masih belum ditentukan. masih diurus kelengkapan dan semacamnya," tandas Romi Yudianto.

⁴ Ribuan WNA di Malang Tak Lapor Imigrasi, (<http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/296-ribuan-wna-di-malang-tak-lapor-imigrasi>), diakses tanggal 17 April 2014

Ditambahkan bahwa pihak Kantor Imigrasi Kelas I Malang sebelumnya telah melakukan deportasi terhadap 32 warga negara asing yang tertangkap. "Pada bulan April sebanyak 27, dan sisanya pada bulan Mei. Total sudah 32 orang,"

Adapun rincian warga negara asing yang dideportasi pada bulan April 2014 lalu yakni warga negara Vietnam 1 orang, Kamboja 8 orang, Tiongkok 10 orang, Timor Leste 3 orang, Papua Nugini 1 orang, India 1 orang, Belanda 2 orang, dan Jerman 1 orang.⁵

"Rata-rata pelanggarannya ada yang izin tinggalnya habis. Paling banyak karena overstay. Mungkin karena ketidaktahuan mereka. Sisanya dikarenakan penyalahgunaan izin tinggal".⁶

Dalam penegakkan hukum maka diperlukan instrumen penegakan hukum yaitu pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif memaksakan kepatuhan.

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing pada dasarnya dilaksanakan mulai saat permohonan visa, izin/tanda masuk dan keluar, pemberian izin tinggal, serta keberadaan dan kegiatan mereka selama berada di wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian dilaksanakan oleh setiap kantor-kantor wilayah imigrasi dan unit penunjang teknis seperti tempat pemeriksaan imigrasi.

2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang penulis kaji di dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan dan tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang terhadap Pelanggaran Ijin Tinggal Terbatas?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Menindak Pelanggaran Ijin Tinggal Terbatas, yang dilakukan warga negara asing di wilayah keimigrasian Malang ?
3. Upaya apa yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang, untuk mengatasi kendala dalam menindak pelanggaran ijin tinggal terbatas yang dilakukan warga negara asing di wilayah Keimigrasian Malang?

⁵ <http://www.Detik News.go.id>, diakses tanggal 17 April 2014

⁶ <http://www.Detik News.go.id>, diakses tanggal 17 April 2014

B. Pembahasan

1. Pengawasan Dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang Terhadap Pelanggan Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Yang Dilakukan Warga Negara Asing

Masuknya investor dan penanam modal asing memicu datang atau didatangkannya tenaga kerja asing yang dirasa memiliki keunggulan kompetitif dalam hal pendidikan maupun penguasaan teknologi untuk masuk wilayah Indonesia termasuk Bali dengan tujuan bekerja.

Untuk mewujudkan tertib hukum dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur tenaga kerja asing baik dari peraturan ketenagakerjaan Indonesia hingga peraturan keimigrasian Indonesia. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa untuk mempekerjakan tenaga kerja asing diperlukan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Oleh karena itu, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengajukan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) untuk memperoleh izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA).

Tenaga kerja asing setelah mendapat izin bekerja dari Kementerian Tenaga Kerja, wajib mengurus visa bekerja yaitu visa tinggal terbatas untuk selanjutnya memperoleh izin tinggal terbatas. Izin tinggal merupakan bukti keberadaan yang sah bagi orang asing untuk berada di wilayah Indonesia. Tanpa izin tinggal, keberadaan orang asing di wilayah Indonesia tidak dikehendaki. Hal ini juga untuk menerapkan kebijakan keimigrasian yaitu politik selektif terhadap orang asing yang masuk wilayah Indonesia. Visa dan Izin tinggal menunjukkan kegiatan yang hendak dilakukan orang asing di wilayah. Jadi orang asing tidak dikehendaki untuk melakukan kegiatan diluar dari atau tidak sesuai dengan maksud pemberian visa dan izin tinggal.

Kebanyakan orang asing yang bekerja di Indonesia, mereka tidak menggunakan tata cara prosedur yang benar dalam mendapatkan izin tinggal, hal ini diperkuat dengan data interview penulis dengan salah satu teacher atau guru les bahasa Inggris di English First Malang, dalam interview yang dilakukan peneliti sebagai berikut;⁷

”Saya tidak mengerti mengenai KITAS tersebut, saya hanya memiliki Paspor dari Kanada, saya tinggal disini hanya untuk waktu 6 bulan saja”

⁷.<http://news.detik.com>. diunduh pada 9 Mei 2014

Dari pernyataan di atas yang dikemukakan guru les bahasa inggris di English First Malang, waktu 6 bulan melebihi waktu tiga hari, yang ditetapkan oleh pemerintah. Izin yang diberikan pemerintah tersebut adalah ijin kunjungan saja.

Sesungguhnya bagaimana cara, pengurusan KITAS yang benar, berdasarkan interview dengan Kepala Kantor Imigrasi Malang Salman Paris Dalimunte, S.E., M.M, dinyatakan prosedur perolehan KITAS yang benar, sebagai berikut: ⁸

”Sebelum mengajukan permohonan Izin Tinggal Terbatas, tenaga kerja asing melalui sponsor/penjaminnya di Indonesia wajib mengajukan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) kepada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk mendapatkan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Setelah mendapatkan izin bekerja dari KEMENAKERTRANS , maka dilanjutkan untuk mengurus dokumen keimigrasian yaitu pengajuan visa bekerja (VITAS) di Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. Setelah proses pengajuan visa selesai, maka dilanjutkan dengan tahap penguasaan visa yang dilakukan di KBRI ataupun Konjen RI. Orang asing atau tenaga kerja asing setiba di bandara wajib memperoleh tanda masuk, dan 7 hari setelah mendapatkan tanda masuk wajib melapor kedatangannya ke kantor imigrasi sekaligus untuk mengurus Izin Tinggal.”

Pada dasarnya persyaratan dan prosedur pemberian Izin Tinggal Terbatas di semua kantor imigrasi adalah sama, hal ini karena didasarkan pada **Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-309.IZ.01.10 tentang Tatacara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian** memuat persyaratan bagi yang mengajukan Izin Tinggal Terbatas.

Mengingat banyaknya pelanggaran yang terjadi, maka penegakan sanksi administrasi harus dilaksanakan. Sanksi Hukum Administrasi, menurut J.B.J.M. ten Berge, ”sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi” . Menurut P de Haan dkk, ”dalam HAN, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis” . JJ. Oosternbrink berpendapat ”sanksi administrasiinistratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah–warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri”.

⁸.<http://news.detik.com>. diunduh pada 9 Mei 2014

Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya bestuursdwang, dwangsom), sanksi punitif artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif, sedangkan Sanksi Regresif adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan,

Perbedaan Sanksi Administrasi dan sanksi Pidana adalah, jika Sanksi Administrasi ditujukan pada perbuatan, sifat repatoir-condemnatoir, prosedurnya dilakukan secara langsung oleh pejabat Tata Usaha Negara tanpa melalui peradilan.

Sedangkan Sanksi Pidana ditujukan pada si pelaku, sifat condemnatoir, harus melalui proses peradilan.

Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi seperti berikut, Bestuursdwang (paksaan pemerintahan), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom).

2. Kendala Yang Dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Menindak Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas Yang Dilakukan Warga Negara Asing Di wilayah Keimigrasian Malang

Hasil interview peneliti dengan Kepala Kantor Imigrasi Malang Salman Paris Dalimunte, S.E., M.M, dinyatakan prosedur perolehan KITAS yang benar, sebagai berikut:⁹

“Kendala pada faktor internal, pastinya tenaga kami yang kurang, pada saat ini terdapat 4 orang pegawai saja yang khusus melakukan pengawasan ITAS. Untuk faktor eksternal kendalanya hanya ada dua, pertama orangnya sulit untuk dilacak keberadaan dan instansinya yang mempersulit untuk di awasi, seperti yang saya jelaskan,Perusahaan Rokok Bentoel yang sekarang sudah diambil alih sebagian sahamnya oleh British American Tobacco, disitu ada pekerja expart atau ahli, saat kami mulai pengawasan perusahaan mem-back-up”

Dari hasil interview di atas dapat disimpulkan bahwa, terdapat dua kendala yakni pada faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal pada saat ini terdapat 4 orang pegawai

⁹ Interview dengan Paris Dalimunte, S.E., M.M Kepala Kantor Imigrasi Malang.

saja yang khusus melakukan pengawasan ITAS. Untuk faktor eksternal kendalanya hanya ada dua, pertama orangnya sulit untuk dilacak keberadaan dan instansinya yang mempersulit untuk di awasi.

Hal ini menggambarkan bahwa betapa buruknya budaya subjek hukum, dalam hal ini perusahaan yang menyelundupkan pekerja asing dalam perusahaan, yang dilindungi oleh perusahaannya. Hal ini sangat memperburuk citra bangsa Indonesia.

Dalam penegakkan hukum maka diperlukan instrumen penegakan hukum yaitu pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif memaksakan kepatuhan.

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing pada dasarnya dilaksanakan mulai saat permohonan visa, izin/tanda masuk dan keluar, pemberian izin tinggal, serta keberadaan dan kegiatan mereka selama berada di wilayah Indonesia.

Pengawasan keimigrasian dilaksanakan oleh setiap kantor-kantor wilayah imigrasi dan unit penunjang teknis seperti tempat pemeriksaan imigrasi.

Adapun sistem pengawasan orang asing di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Pengawasan Tertutup, diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni meliputi:
 - a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi keimigrasian,
 - b. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan dan pencegahan,
 - c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah indonesia (secara administratif)
 - d. Pengambilan foto dan sidik jari, dan
 - e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dan Pasal 74 yaitu pejabat imigrasi melakukan Fungsi Intelijen Keimigrasian.

2. Pengawasan Terbuka (Pasal 69), yaitu pengawasan langsung yang dilakukan dengan membentuk tim pengawasan orang asing dengan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga lain. Dalam pelaksanaan dilapangan berkaitan dengan pengawasan terbuka, koordinasi dengan instansi atau lembaga lain tidak mesti dilakukan karena akan memerlukan waktu dan biaya yang banyak Adapun pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Indonesia khususnya Kantor Imigrasi Kelas I

a. Pengawasan Tertutup

1. Pelaksanaan pengawasan dapat berdasarkan atas data/informasi keimigrasian, berdasarkan informasi masyarakat, maupun informasi dari media cetak atau elektronik.
2. Berdasarkan data atau sumber diatas, maka dilakukanlah pengumpulan bahan informasi, yang untuk kemudian dilakukan analisa kasus.

b. Pengawasan Terbuka

3. Setelah dilakukan analisa kasus, maka dibentuklah tim pengawasan orang asing untuk terjun langsung ke lapangan.
4. Setelah tim terbentuk, maka diterbitkan surat perintah pemeriksaan ke tempat yang diperkirakan terjadi pelanggaran keimigrasian.
5. Melakukan pemeriksaan dokumen di tempat.
6. Membuat laporan kejadian berupa berita acara pemeriksaan.
7. Pembuatan berita acara pendapat mengenai dugaan terjadinya pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian.
8. Setelah melalui acara pendapat, maka dikeluarkan keputusan kepala kantor imigrasi apakah telah terjadi perbuatan melanggar undang-undang keimigrasian atau tidak.
9. Apabila keputusan tersebut menetapkan bahwa terjadi pelanggaran keimigrasian ataupun tindak pidana Keimigrasian, maka dilanjutkan ke tahap Tindakan Keimigrasian.

Salah satu instrumen penegakan hukum selain pengawasan adalah dengan melakukan penegakan sanksi. Sebelum menerapkan sanksi, maka diperlukan suatu tindakan. Tindakan Keimigrasian adalah setiap tindakan yang diambil terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan pelanggaran, penyimpangan, penyalahgunaan dan kejahatan keimigrasian.

Hasil interview peneliti dengan Kepala Kantor Imigrasi Malang Salman Paris Dalimunte, S.E., M.M, dinyatakan prosedur perolehan KITAS yang benar, sebagai berikut:¹⁰

“Tindakan keimigrasian ada dua pada dasarnya, pertama adalah Tindakan Administrasi Keimigrasian dan kedua adalah Tindakan Pro Yustisia, terkait permasalahan KITAS kami biasanya melakukan Tindakan Administrasi Keimigrasian, mengingat lebih murah dan efektif dibandingkan harus bersusah payah ke pengadilan.”

Tindakan keimigrasian dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu Tindakan Administrasi Keimigrasian dan Tindakan Pro Yustisia. Tindakan Keimigrasian dalam pelaksanaannya terhadap adanya pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal lebih condong untuk mengambil Tindakan Administratif Keimigrasian, karena selain dari segi biaya yang dibutuhkan lebih sedikit, penyelesaian hukum secara pro justisia akan memakan waktu yang relatif lama.

3. Upaya Yang Dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Untuk Mengatasi Kendala Dalam Menindak Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas Yang Dilakukan Warga Negara Asing Di Wilayah Keimigrasian Malang

Terkait Upaya Yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang, untuk mengatasi Kendala Dalam Menindak Pelanggaran Ijin Tinggal Terbatas yang dilakukan warga negara asing di wilayah Keimigrasian Malang, berdasarkan hasil Hasil interview peneliti dengan Kepala Kantor Imigrasi Malang Salman Paris Dalimunte, S.E., M.M, dinyatakan prosedur perolehan KITAS yang benar, sebagai berikut:¹¹

”Upaya yang kami lakukan, pertama, kami terus membenahi sistem keimigrasian yang ada di bandara dan kedua, kami adakan sosialisasi di dengan cara mengumpulkan perwakilan perusahaan-perusahaan asing bersama-sama dengan Disnakertrans Kota Malang, kami membahas mengenai resiko memperkerjakan pekerja asing tanpa Izin.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, mengingat bandara merupakan akses keluar dan masuknya Warga Negara asing, maka sistem keamanan prosedural tersebut wajar harus sangat diperhatikan agar memperkecil resiko kerugian negara.

¹⁰ Interview dengan Paris Dalimunte, S.E., M.M Kepala Kantor Imigrasi Malang.

¹¹ Interview dengan Paris Dalimunte, S.E., M.M Kepala Kantor Imigrasi Malang.

Sosialisai terhadap perusahaan asing yang mempekerjakan pekerja asing tanpa Izin harus terus dilakukan, mengingat mempekerjakan pekerja asing tanpa Izin merupakan tindak pelanggaran, dan harus mendapatkan sanksi tegas. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.

Jenis sosialisasi:

Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat).

a) Sosialisasi primer

Peter L. Berger dan Luckmann mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga).¹²

Dalam tahap ini, peran orang-orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas di dalamnya. Warna kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh warna kepribadian dan interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekatnya.

b) Sosialisasi sekunder

Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan ke dalam kelompok tertentu atau dalam masyarakat.

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini terkait Upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang, untuk mengatasi Kendala Dalam Menindak Pelanggaran Ijin Tinggal Terbatas yang dilakukan warga negara asing di wilayah Keimigrasian Malang adalah sosialisasi sekunder, dimana subjeknya adalah masyarakat. Dalam penelitian ini sosialisasi dilakukan terhadap perusahaan asing yang mempekerjakan warga asing. Kantor Imigrasi Kelas I Malang melakukan Sosialisasi sekunder, dengan cara mengumpulkan perwakilan perusahaan-perusahaan asing bersama-sama dengan Disnakertrans Kota Malang, mengenai resiko mempekerjakan pekerja asing tanpa Izin.

¹² <http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi>, diunduh pada 24 April 2013

C. Penutup

1. Kesimpulan

A. Pengawasan Dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas

Pengawasan dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang, Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas, Kantor Imigrasi Kelas I Malang melakukan dengan dua cara, yakni dengan cara:

- a. Pengawasan Tertutup, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas I Malang melalui dokumen-dokumen keimigrasian.
- b. Pengawasan Terbuka, yaitu pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang melalui pemeriksaan keadaan dilapangan.

Salah satu instrumen penegakan hukum selain pengawasan adalah dengan melakukan penegakan sanksi. Sebelum menerapkan sanksi, maka diperlukan suatu tindakan. Tindakan yang dimaksudkan adalah tindakan keimigrasian. Tindakan keimigrasian dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu Tindakan Administrasi Keimigrasian dan Tindakan Pro Yustisia. Tindakan Keimigrasian dalam pelaksanaannya terhadap adanya pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal lebih condong untuk mengambil Tindakan Administratif Keimigrasian, karena selain dari segi biaya yang dibutuhkan lebih sedikit, penyelesaian hukum secara pro justisia akan memakan waktu yang relatif lama.

Sesungguhnya mengenai sanksi terhadap warga asing yang tidak memiliki ijin tinggal terbatas, sudah diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yakni dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

B. Kendala Yang Dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Menindak Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas Yang Dilakukan Warga Negara Asing Diwilayah Keimigrasian Malang

Kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam menindak pelanggaran ijin tinggal terbatas yang dilakukan warga negara asing diwilayah keimigrasian Malang, kendalanya yakni ada dua, pertama orangnya sulit untuk dilacak keberadaan dan instansinya

yang mempersulit untuk diawasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I. Hal ini menggambarkan bahwa buruknya budaya subjek hukum, dalam hal ini perusahaan asing yang menyelundupkan pekerja asing dalam perusahaan, yang dilindungi oleh perusahaannya.

C. Upaya Yang Dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Untuk Mengatasi Kendala Dalam Menindak Pelanggaran Ijin Tinggal Terbatas Yang Dilakukan Warga Negara Asing Di wilayah Keimigrasian Malang

Terkait Upaya Yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang, untuk mengatasi Kendala Dalam Menindak Pelanggaran Ijin Tinggal Terbatas yang dilakukan warga negara asing di wilayah Keimigrasian Malang, Kantor Imigrasi Kelas I Malang melakukan sosialisasi di perusahaan-perusahaan asing.

2. Saran

- a. Disarankan bagi Perusahaan asing dan juga pekerja asing yang berada di Indonesia, sebaiknya memenuhi persyaratan pengajuan Ijin Tinggal Terbatas, serta memberikan laporan kepada Kantor Imigrasi secara periodik agar kelak tidak merugikan negara.
- b. Disarankan bagi Kantor Imigrasi Kelas I Malang, Sosialisasi harus terus dilakukan secara berkelanjutan, terhadap perusahaan asing dan juga pekerja asing mengenai pentingnya Ijin Tinggal Terbatas.
- c. Disarankan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sistem keamanan dan prosedur pengurusan Ijin tinggal harus lebih diperketat lagi, melalui pengaturan yang lebih tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, 1991, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Jakarta: Rineka Cipta,

Bagir Manan, 2000, “**Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional**”, disampaikan dalam **Rapat Kerja Nasional Keimigrasian**, Jakarta, 14 Januari,

Bungin B., 2001, **Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif**, Surabaya: Airlangga University Press.

Dwidjowijoto, R. N. 2007, “**Analisis Kebijakan**”. Jakarta: Elek Media komputindo,

John Sarodja Saleh, 2008, **Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian**, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta Selatan.

Lili Rasjidi, , 2001. **Hukum Sebagai Suatu Sistem**, Bandung: Rosdakarya

M. Imam Santoso, 2004. **Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional**. Jakarta: UI Press

Muladi. 2002, **Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana**, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Philipus M. Hadjon dkk, 2002. “**Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**”, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Prasetyo, Bambang. 2005. **Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi**, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ridwan H.R., 2007, **Hukum administrasi Negara**, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Satjipto raharjo, 1983, *masalah penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*, Bandung: sinar baru

Sihar Sihombing, 2013. **Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia**. Bandung: Nuansa Aulia,

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. **Perpajakan Indonesia Teori dan Teknis Perhitungan**. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Shidarta Darji Darmodiharjo, 1995, **Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filosafat Hukum Indonesia**, Jakarta : Gramedia

Soerjono soekamto. 1985, **Efektifitas hukum dan peranan sanksi**, Bandung: remadja jaya
Wahyudin Ukun, 2004. **Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian**, Jakarta : Adi Kencana Aji

Wijayanti, Herlin, 2011, **Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian**, Malang: Bayu Media Publishing,

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Internet

<http://news.detik.com>

<https://docs.google.com/document/d>

<http://www.imigrasi.go.id>